



WACANA TOLERANSI DALAM PROGRAM “KAMPUNG MODERASI BERAGAMA” KABUPATEN BANGKA TENGAH

Izcha Pricispa¹, Fitri Ramdhani Harahap², Herza³

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Email: izchapkp123@gmail.com

Abstract

Indonesia's multicultural society, especially about religious diversity, has the potential for inter-religious conflict. In this regard, the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, as the representation of the state, designed a religious moderation village program. The purpose of the program is to overcome religious issues that have the potential for religious conflict, such as: intolerance, radicalism, or even violence stemming from various religious differences that exist. This research aims to analyze the discourse of tolerance that is constructed in the religious moderation village program in Central Bangka. Second, to analyze the production of tolerance discourse and the interpretation of the people of Central Bangka. Third, to analyze the socio-political context that influences the formation of tolerance discourse in the religious moderation village program in Central Bangka. The research was conducted in Central Bangka. This research uses a qualitative approach with a critical discourse analysis method. The technique of determining research informants using purposive sampling with data collection techniques of interviews, observation, and documentation. The results of this study show that the discourse of tolerance constructed at the text analysis level uses language that is easily accepted by the community. In addition, the production process of tolerance discourse is carried out by actors who have social and political power and interpretations from the community related to this program are also not always linear with policy agencies, although most people accept the narrative of moderation and tolerance. Finally, situational, institutional, and social are interrelated. Starting from the issue of intolerance in Central Bangka to the influence of organizational institutions in the production of tolerance discourse and the political system in Central Bangka.

Keywords: *Tolerance Discourse, Religious Moderation Village Program, Critical Discourse Analysis*

Abstrak

Masyarakat Indonesia yang multikultural, khususnya terkait dengan keberagaman agama memiliki potensi untuk terjadinya konflik antar agama. Berkenan dengan hal tersebut, Kementerian Agama RI sebagai representasi negara merancang program kampung moderasi beragama. Hadirnya program tersebut untuk mengatasi isu-isu agama yang berpotensi untuk terjadinya konflik agama, seperti: intoleransi, radikalisme, atau bahkan kekerasan yang bersumber dari pelbagai perbedaan keagamaan yang ada. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis wacana toleransi yang dikonstruksikan dalam program kampung moderasi beragama di Bangka Tengah. Kedua, untuk menganalisis produksi wacana toleransi dan interpretasi masyarakat Bangka Tengah. Ketiga, untuk menganalisis konteks sosial politis yang mempengaruhi terbentuknya wacana toleransi dalam program kampung moderasi beragama di Bangka Tengah. Lokasi penelitian dilakukan di Bangka Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis. Teknik penentuan informan penelitian menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wacana toleransi yang dikonstruksikan dalam level analisis teks menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu proses produksi wacana toleransi dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan sosial dan politik serta interpretasi dari masyarakat terkait program ini juga terlihat tidak selalu linier dengan instansi kebijakan, meskipun sebagian besar masyarakat menerima narasi moderasi dan toleransi. Terakhir, secara situasional, institusional, dan sosial saling berkaitan. Mulai dari isu intoleransi yang ada di Bangka Tengah sampai dengan pengaruh institusi organisasi dalam produksi wacana toleransi serta sistem politis di Bangka Tengah.

Kata Kunci: *Wacana Toleransi, Program Kampung Moderasi Beragama, Analisis Wacana Kritis*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan budaya. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah, diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Di tengah kemajemukan itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selaras dengan semboyan negara Indonesia yakni *"Bhinneka Tunggal Ika"* yang mempunyai arti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keanekaragaman yang ada kemudian membuat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang multikultural. Multikultural sendiri dapat dimaknai dengan keberagaman budaya yang ada dalam sebuah negara.

Kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural tidak jarang menjadi salah satu konteks yang membuat tumbuhnya isu-isu ekstremisme, radikalisme atau bahkan kekerasan. Di tengah negara yang multikultural, keberagaman yang ada tentu saja berimplikasi pada ekstremisme atau bahkan radikalisme dan hal tersebut memang sangat erat kaitannya (Nurhaliza, 2024; Truna et al., 2020). Oleh karena itu, nilai toleransi memang harus kuat untuk digaungkan sehingga dapat menjadi antitesa dari isu-isu radikalisme, ekstremisme, diskriminasi serta kekerasan. Wacana toleransi dalam kehidupan bernegara saat ini cukup penting untuk dikampanyekan, karena ada beberapa ancaman nyata berkenaan dengan tindakan intoleransi. Salah satunya, pada tahun 2023 sebanyak 148 orang ditangkap atas kasus terorisme yang mana mereka didominasi oleh anggota jaringan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah (Solihin, 2023).

Sebagai salah satu upaya untuk menanggapi persoalan ini, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai representasi negara, pada tahun 2023 membuat program kampung moderasi beragama. Kemudian dalam Pelaksanaannya, program kampung moderasi beragama mempunyai dasar hukum yang mana tercantum pada Keputusan Menteri Agama No. 92 Tahun 2022 tentang kelompok kerja penguatan program kampung moderasi beragama Kementerian Agama serta sebagai implementasi dari sila ke-3 Pancasila yakni "Persatuan Indonesia". Program kampung moderasi beragama ini bersifat untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama serta menciptakan kerukunan di tengah masyarakat (Fathurahman, 2020).

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama RI, sebanyak 1.000 kampung moderasi beragama akan diluncurkan dan program ini telah berjalan dari Juli 2023 (Kementerian Agama RI, 2023). Dalam konteks Bangka Belitung, setiap kabupaten/kota akan menetapkan satu desa untuk disematkan sebagai kampung moderasi beragama. Salah satu nilai yang ditonjolkan dalam program ini selain asas keadilan dan persatuan yakni

toleransi (Khoiri, 2019). Selain itu berdasarkan informasi yang ditelusuri oleh peneliti, baik itu di media massa ataupun pendapat dari para tokoh yang berbicara tentang program kampung moderasi beragama, nilai toleransi itu menjadi sesuatu yang dominan direpresentasikan dalam program tersebut. Berdasarkan dari kondisi ini maka, analisis wacana yang menjadi fokus dalam penelitian ini *concern* kepada wacana toleransi *versi* program kampung moderasi beragama.

Perspektif kajian kritis ilmu sosial menyatakan bahwa, wacana sendiri merupakan perspektif yang dinarasikan sebagai kebenaran yang mutlak dan bersifat argumentatif yang seolah-olah itu adalah sebuah kebenaran bagi penutur dan kebenaran yang dinarasikan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi melalui proses konstruksi realitas. Sederhananya, wacana yang terus menerus dikonstruksikan akan membuat *common sense* atau sebuah kelumrahan dalam masyarakat, terlepas itu benar maupun salah. Maksud dari penggunaan kata wacana dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengkaji atau membongkar terkait dengan dimensi teks baik itu secara verbal maupun non-verbal yang berkenaan langsung dengan program kampung moderasi beragama dan kemudian akan dikemas oleh peneliti. Wacana dapat juga diartikan sebagai satuan bahasa lengkap yang mana diperoleh baik itu secara lisan maupun tulisan dan bersifat koheren, kohersi, tepadu, dan mampu menggambarkan hasil dari interaksi sosial sehingga bisa dipahami oleh pembaca (Kridalaksana, 2008). Dalam Konteks penelitian ini, program kampung moderasi beragama itu bisa disebut sebagai wacana.

Penelitian ini diarahkan untuk membongkar wacana toleransi dalam program kampung moderasi beragama khusus di Kabupaten Bangka Tengah, melihat bagaimana masyarakat menginterpretasi program kampung moderasi beragama tersebut sebagai sebuah wacana, serta melihat bagaimana konteks sosial-politis yang mempengaruhi terbentuknya wacana toleransi tersebut. Alasan peneliti memilih program kampung moderasi beragama di Kabupaten Bangka Tengah sebagai objek penelitian karena berdasarkan penelusuran peneliti di media, dalam konteks Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah yang sangat kuat menggaungkan program kampung moderasi beragama. Kabupaten Bangka Tengah juga menjadi lokasi direncanakan berdirinya Perguruan Tinggi Negeri Konghucu, yang mana pada saat itu sempat terjadi dinamika penolakan sehingga Bangka Tengah menjadi perbincangan terkait dengan toleransi-intoleransi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis (AWK). Menurut Harahap (2020) penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang bertumpu pada pola pikir induktif, yang mana didasarkan oleh pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu fenomena sosial. Pada umumnya, penelitian ini dipergunakan dalam rumpun ilmu sosial humaniora.

Sementara itu, metode analisis wacana kritis ini juga masuk ke dalam paradigma kritis. Analisis wacana kritis mempunyai prinsip-prinsip, diantaranya berorientasi pada masalah, elektik dan interdisipliner, mendemistifikasi ideologi dan kuasa melalui kajian sistematis atas data berupa ucapan, tulisan maupun citra visual, minat dan posisi ditempatkan secara tegas pada saat mempertahankan metodologi ilmiah yang dipilih serta refleksi diri atas proses penelitian yang dilakukan (Subagyo, 2018; Wodak & Meyer, 2009).

Metode ini dianggap relevan untuk menelusuri wacana toleransi dari program kampung moderasi beragama. Penelitian kualitatif juga dianggap relevan karena dalam penelitian ini nantinya akan ada pendalaman data terkait dengan program kampung moderasi beragama di Kabupaten Bangka Tengah melalui teori analisis wacana kritis model Norman Fairclough. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk melihat secara simultan wacana yang dikonstruksikan oleh Kemenag Bangka Tengah serta masyarakat Desa Trubus, sehingga dapat menjawab fenomena yang terjadi selaras dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Kemudian, Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti menganalisis penelitian berada. Maka, lokasi yang dijadikan tempat penelitian ini adalah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dengan mempertimbangkan beberapa hal sesuai kriteria informan yang diinginkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terakhir, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, **Pertama** deskripsi. Tahapan dalam penelitian ini dimulai dengan pengumpulan dan pengklasifikasian teks baik itu secara verbal maupun non-verbal terkait dengan program kampung moderasi beragama. Pada tahap ini teks dijelaskan tanpa menghubungkan dengan aspek lain. Analisis teks ini dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa, sumber yang dikutip, cara penyajian serta simbol-simbol verbal maupun non-verbal (Herza, 2019). Teks yang dimaksud kemudian diuraikan secara deskriptif dengan diikuti pencarian unsur-unsur makna atau interpretasi dan relasi. **Kedua** interpretasi, dalam tahapan ini akan menafsirkan teks yang kemudian dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Teks ini nantinya dihubungkan dengan

proses pemroduksian dan pengkonsumsiannya oleh masyarakat. **Ketiga** eksplanasi, tahapan ini merupakan tahapan terakhir yang menjelaskan hubungan antara teks dan struktur sosial, politis, budaya atau bahkan keagamaan melalui tempat terciptanya wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Dimensi Teks (Membongkar Teks Verbal dan Non-verbal yang Memuat Program Kampung Moderasi Beragama)

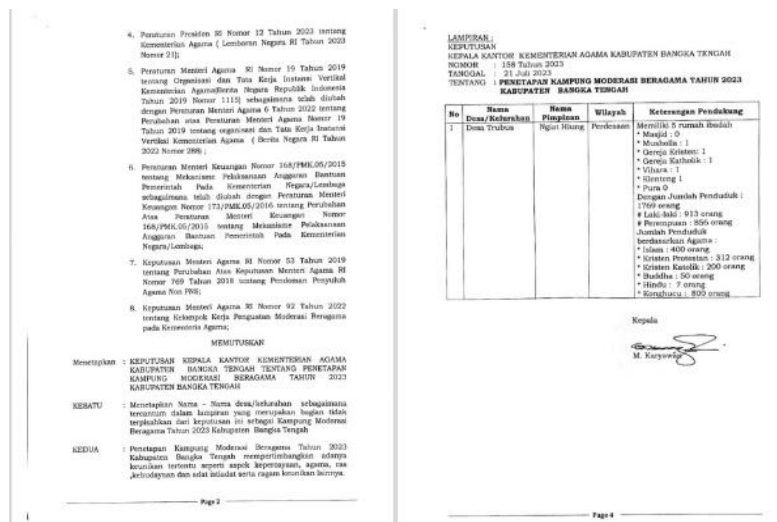
Analisis dimensi teks merupakan salah satu dari tiga dimensi analisis wacana kritis yang dikemukakan oleh Norman Fairclough. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, teks dalam hal ini akan melihat baik secara verbal maupun non-verbal yang berkenaan langsung dengan Program Kampung Moderasi Beragama seperti dokumen program dan hasil wawancara bersama Kepala Kementrian Agama Bangka Tengah. Kemudian akan dinalisis secara semantik, linguistik, kosa kata dan tata kalimat. Selain daripada itu, dalam dimensi teks juga akan melihat koherensi dan kohesivitas terkait dengan, bagaimana antar kata atau antar kalimat tersebut digabung sehingga membentuk sebuah pengertian.

Semua elemen yang dianalisis tersebut digunakan untuk melihat tiga aspek dalam teks, yakni representasi (bagaimana peristiwa, orang, situasi, kelompok, atau apa pun digambarkan dan ditambihkan dalam teks), relasi (bagaimana konstruksi hubungan diantara penginisiasi program yang dalam hal ini Kementrian Agama RI dengan Kementrian Agama Bangka Tengah ditampilkan dalam teks), dan identitas (bagaimana identitas Kementrian Agama RI dan Kementrian Agama Bangka Tengah dikonstruksikan dalam teks) (Eriyanto, 2009; Fairclough, 2010). Dengan kata lain, pada level ini Fairclough berupaya untuk mengungkap atau membongkar bagaimana bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai sarana konstruksi sosial yang kemudian dapat merefleksikan atau bahkan mereproduksi ideologi tertentu.

Adapun analisis dimensi teks ini difokuskan pada Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bangka Tengah No. 158 Tahun 2023 tentang penetapan kampung moderasi beragama tahun 2023 Kabupaten Bangka Tengah dan menganalisis hasil wawancara bersama Bapak H. M. Karyawan, S.Ag selaku Kepala Kemenag Bangka Tengah. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa halaman dan hasil wawancara yang dipilih peneliti untuk kemudian menjadi bagian yang difokuskan dalam analisis ini, yakni diputuskan setelah membaca dan mendengarkan berulang kali, sehingga kemudian tersortir bagian atau halaman dan hasil wawancara yang dinilai benar-benar menampilkan teks yang berisikan toleransi dalam program kampung moderasi beragama.

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah No. 158 Tahun 2023 tentang Penetapan Kampung Moderasi Beragama Tahun 2023 Kabupaten Bangka Tengah

Sebagai implementasi dari penguatan moderasi beragama dan mendukung pencapaian sasaran penguatan program kampung moderasi beragama, tentu saja diperlukan keputusan penetapan ini sebagai langkah awal penginisiasian Program Kampung Moderasi Beragama di Bangka Tengah. Keputusan ini memuat nama Desa yang ditetapkan sebagai Kampung Moderasi Beragama. Berikut analisis keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah No. 158 Tahun 2023.



sumber: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah No. 158 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama Tahun 2023 Bangka Tengah

Keputusan ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI No. 137 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan Kampung Moderasi Beragama Tahun 2023, hal ini termaktub dalam halaman ke satu keputusan ini. Oleh karena itu, penetapan kampung moderasi beragama diperlukan di Bangka Tengah. Selanjutnya pada halaman kedua poin kesatu, dengan menetapkan nama desa yang akan disematkan sebagai kampung moderasi beragama. Program kampung moderasi beragama ini memang berfokus di tingkat Desa, yang mana Desa merupakan tempat interaksi antar individu atau masyarakat yang bisa dikatakan mereka melakukan interaksi lebih *intens* ketimbang masyarakat yang ada di kota, hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di kota cenderung mempunyai sikap yang individual. Selain daripada itu, dari kalimat yang ada dalam keputusan ini juga mencerminkan kesadaran pemerintah untuk kemudian merasa bahwa penguatan moderasi beragama pada tingkat akar rumput itu sangat

penting. Sehingga dengan mendekatkan program ini di tingkat desa, maka diharapkan pula pesan-pesan dari moderasi beragama dapat diterima serta diterapkan dengan lebih efektif, terlebih lagi jika karakteristik masyarakat yang ada di desa itu cenderung lebih homogen dan hubungan sosial mereka pun tergolong cukup erat. Direalisasikan di tingkat desa juga dapat memperlihatkan pemahaman bahwa kerukunan antar umat beragama itu memang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Kemudian terlihat pada halaman keempat bahwa Kementrian Agama Bangka Tengah menyematkan Desa Trubus sebagai kampung moderasi beragama meskipun terdapat 63 Desa lainnya yang ada di Bangka Tengah. Artinya, penyematan itu tidak serta merta tanpa dasar yang kuat, akan tetapi, jika dilihat Desa trubus memang sangat plural. Hal ini dapat diperhatikan mulai dari Kepala Desa Trubus (Ngiat Hiung) yang beragama Konghucu serta masyarakat Desa yang merepresentasikan setiap agama yang diakui oleh pemerintah, dengan rincian persentase sebagai berikut: jumlah penduduk yang menganut agama Konghucu sebesar 45,22%, Islam 22,61%, Kristen Protestan 17,64%, Kristen Katolik 11,31%, Buddha 2,83%, dan Hindu 0,40%.

Teks dalam keputusan ini menunjukkan adanya konstruksi identitas sosial, yang mana berupaya untuk membangun identitas kampung yang ideal. Sehingga keberagaman itu dapat dipandang sebagai keunikan atau kekayaan yang harus dikelola dengan sikap moderat. Hal ini akan berimplikasi pada penciptaan kampung yang toleran sebagai model masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, teks dalam keputusan ini membentuk wacana toleransi beragama yang tidak hanya bersifat normatif, akan tetapi juga berfungsi untuk mereproduksi paradigma masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Sehingga keberadaan teks ini juga diharapkan untuk mendorong terwujudnya penambahan atas penyematan sebagai kampung moderasi beragama yang nantinya akan mampu menampung keberagaman.

Wacana toleransi di tengah masyarakat yang berbeda agama merupakan topik yang sangat penting dan dapat dikatakan kompleks. Hal ini karena berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok yang mempunyai keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan dengan damai dan harmonis. Kemudian halaman kedua yang menyatakan bahwa penetapan itu berlandaskan pada keunikan tertentu yang di dalamnya merujuk kepada paham toleransi beragama yang ditafsirkan sebagai sebuah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan dengan tidak memaksakan pandangan atau praktik agama seseorang kepada orang lain di tengah beragamnya agama, kepercayaan, kebudayaan, adat istiadat atau pun hal lainnya. Keputusan ini merupakan suatu kebijakan yang mendukung kebebasan beragama di tengah masyarakat multikultural sehingga terciptanya toleransi. Oleh karena

Negara yang dapat memainkan peran kunci dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak warga negara terkait dengan kebebasan beragama serta memastikan bahwasannya tidak ada diskriminasi bagi setiap individu maupun kelompok agama tertentu. Kalimat yang terkandung dalam keputusan ini bersifat deklaratif. Hal ini dikarenakan terdapat pernyataan yang menyampaikan fakta, keyakinan, atau opini yang sering kali muncul dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu secara tegas.

Wawancara yang dilakukan pada 6 November 2024 bersama Kakanwil Kemenag Bangka Tengah, Bapak H.M Karyawan selaku penginisiasian program kampung moderasi beragama di Bangka Tengah diklasifikasikan sebagai berikut:

“Pemerintah dan masyarakat Desa Trubus juga harus berinisiatif terhadap kampungnya dan sadar bahwa kampungnya sudah ditetapkan sebagai kampung moderasi. Ketika ada kegiatan apapun seperti, gotong royong atau bahkan jalan santai, itu perlu dikaitkan dengan program tersebut”.

Ungkapan di atas memperlihatkan bahwa program tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini dikarenakan keberhasilan program ini membutuhkan kerja sama yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dengan menghargai pelbagai perbedaan. Dalam hal ini, pemerintah dapat dikatakan sebagai pengarah atau fasilitator sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan selaras dengan tujuan (moderasi beragama). Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab atas terciptanya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan moderasi beragama, melalui penyuluhan kepada masyarakat atau semacam pelatihan. Pemerintah juga berperan untuk memonitoring serta mengevaluasi pelaksanaan program tersebut, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwasanya prinsip-prinsip dari moderasi beragama diterapkan dengan baik di seluruh elemen masyarakat.

Kalimat ini juga masuk kedalam kalimat deklaratif serta imperaktif. Kalimat deklaratif tercermin dalam kalimat seperti *“sadar bahwa kampungnya sudah ditetapkan sebagai kampung moderasi”* kalimat deklaratif ini menyampaikan suatu kalimat sebagai fakta absolut. Deklaratif semacam ini memang acapkali digunakan oleh figure otoritas untuk kemudian membangun kepercayaan dan mengukuhkan legitimasi atas pernyataannya. Selanjutnya, kalimat imperaktif tercermin dalam kalimat *“Pemerintah dan masyarakat Desa Trubus juga harus berinisiatif terhadap kampungnya”*. Kalimat ini diperuntukkan untuk memberikan arahan, perintah, atau instruksi kepada pemerintah dan masyarakat Desa Trubus.

Sedangkan masyarakat Desa Trubus dalam hal ini akan menjadi penggerak dan

pelaksana. Hal ini dikarenakan, masyarakat Desa adalah pihak yang langsung terlibat dalam kehidupan sosial dan budaya sehari-hari. Maka dari itu, masyarakat mempunyai peran kunci dalam menerapkan dan menjaga nilai-nilai moderasi beragama di tingkat lokal. Kesuksesan program ini sangat bergantung dengan partisipasi aktif masyarakat Desa Trubus dalam membangun nilai-nilai toleransi. Namun demikian, masyarakat Desa Trubus juga perlu mendapatkan dorongan agar mereka lebih paham akan pentingnya moderasi beragama di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Pemerintah Daerah bersama pemerintah Desa dan masyarakat Desa Trubus harus bersinergi untuk merealisasikan program ini agar terwujudnya kedamaian dan sikap saling menghargai di dalam masyarakat. Peneliti beranggapan bahwasanya kolaborasi itu cukup penting untuk keberhasilan program ini agar mencegah paham-paham radikal. Dengan demikian, meskipun pemerintah mempunyai peran penting dalam merancang dan mengawasi pelaksanaan program tersebut, masyarakat juga mempunyai tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan serta menjaga *sustainable* program tersebut dalam kehidupan sosialnya.

Sederhananya, narasi yang ditampilkan diatas dapat dikaitkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini, masyarakat menjadi agen perubahan karena masyarakat dapat dilibatkan untuk mengambil inisiatif dalam mempromosikan toleransi di lingkungan sekitar (tingkat Desa ataupun keluarga). Narasi ini juga akan mendorong supaya toleransi dapat menjadi sebuah gerakan kolektif yang dimulai dari bawah (*grassroots movement*) yang dalam hal ini merujuk kepada pelibatan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kemudian, Kakanwil Kemenag Bangka Tengah juga turut memberikan pemaknaan terkait dengan toleransi. Kakanwil Kemenag Bangka Tengah mengungkapkan:
“membiarkan orang lain yang berbeda dengan kita, mengormati perbedaan dengan tidak saling mengganggu dan merendahkan”

Ungkapan (teks) yang ditampilkan ini tampak dimaksudkan untuk mengkonstruksi wacana toleransi di Kabupaten Bangka Tengah. Ungkapan tersebut juga mencerminkan upaya untuk menciptakan sebuah budaya yang mendukung keharmonisan antar umat beragama serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat yang multikultural.

Memperkuat toleransi antar umat beragama merupakan fondasi utama dalam kehidupan masyarakat multikultural. Dalam kalimat ‘membiarkan orang lain yang berbeda dengan kita, mengormati perbedaan dengan tidak saling mengganggu dan merendahkan’ mempunyai makna bahwasanya menguatkan hubungan antar umat beragama dengan cara saling menghormati perbedaan (baik dalam hal agama, keyakinan, tradisi, maupun budaya)

perlu untuk ditekankan. Agar dapat mengindikasikan bahwa konflik yang muncul dari perbedaan agama itu perlu dihindari dengan cara mengembangkan sikap menghormati perbedaan yang ada dan memahami antara satu dengan yang lain. Selain daripada memperkuat toleransi, ungkapan tersebut juga memiliki makna bahwa pelbagai perbedaan yang ada bukanlah suatu hambatan, melainkan aset yang dapat memperkaya kehidupan sosial. Wacana yang dikonstruksi tersebut menandakan bahwa terdapat upaya membangun kerukunan sosial melalui perbedaan. Hal ini dikarenakan, kerukunan sosial itu dapat terwujud apabila masyarakat mampu memanfaatkan perbedaan tersebut dengan cara-cara yang positif dan tidak saling mengganggu atau menyinggung. Sehingga ungkapan tersebut seolah-olah memberikan pesan bahwa keberagaman itu seharusnya menjadi dasar untuk membangun solidaritas sosial.

Selanjutnya, ungkapan tersebut juga mengarahkan perhatian akan pentingnya moderasi beragama, sehingga wacana toleransi yang dikonstruksi tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan (ajaran agama) itu harus dipahami secara seimbang dan tidak terjebak pada interpretasi-interpretasi yang ekstrem. Dalam konteks ini, moderasi beragama dapat menjadi solusi atas permasalahan kekerasan, ekstremisme dan radikalisme, yang dapat merusak tatanan dalam masyarakat.

Analisis Dimensi Discourse Practice

Dimensi kedua dalam analisis wacana kritis model Norman Fairclough adalah praktik kewacanaan. Analisis ini terfokus dan tertuju pada bagaimana teks tersebut diproduksi serta dikonsumsi (Fairclough, 1995). Teks dibentuk melalui suatu praktik diskursus yang nantinya akan menentukan bagaimana teks tersebut diproduksi (Eriyanto, 2009; Shoemaker, 1996).

Produksi Wacana Toleransi dalam Program Kampung Moderasi Beragama

Pertama, penjelasan akan masuk kepada isu toleransi-intoleransi di Kabupaten Bangka Tengah. Pada tahun 2023 terdapat isu toleransi-intoleransi yang beredar. Hal ini terjadi karena terdapat upaya penolakan pembangunan PTN Konghucu di Bangka Tengah. Isu toleransi-intoleransi di Bangka Tengah semakin memanas ketika sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung dan Aliansi Umat Islam Bangka Tengah melakukan gerakan penolakan atas rencana pendirian PTN Konghucu (Mahendra, 2022). Salah satu hal yang menjadi dasar penolakan tersebut adalah PTN konghucu itu tidak cocok dibangun karena mayoritas masyarakat Bangka Tengah beragama Islam (Pricispa et al., 2023). Menilik alasan tersebut, maka cukup besar kemungkinan terjadinya konflik berbasis agama yang didasari oleh sikap intoleransi dari masyarakat.

Kedua, dalam produksi wacana toleransi pada program kampung moderasi beragama, pilihan bahasa yang digunakan itu sangat penting sehingga dapat membangun pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai toleransi. Penggunaan kata-kata baik pada teks dokumen dan hasil wawancara bersama Kemenag Bangka Tengah (yang sudah peneliti bahas di level analisis teks) mencerminkan kata-kata yang inklusif serta tidak membedakan antar kelompok agama. Hal ini semacam memperkuat pesan persatuan dan kesetaraan. Selain daripada itu, gaya penyampaian yang menggunakan contoh konkret serta pendekatan yang berbasis pengalaman masyarakat lokal tentu dapat menjadikan wacana toleransi lebih mudah diterima serta relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di Desa Trubus.

Ketiga, dalam perspektif Fairclough, wacana tidak hanya memiliki fungsi untuk merepresentasikan kenyataan sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk hubungan kekuasaan. Dalam program kampung modeasi beragama, produksi wacana dilakukan oleh aktor-aktor yang memiliki kekuasaan sosial dan politik, yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI. Kemudian program tersebut diinstruksikan kembali kepada Kemenag Bangka Tengah. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah melalui kebijakan dan strategi komunikasi yang dimiliki memainkan peran dominan dalam merancang dan memfasilitasi program tersebut sebagai upaya untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang toleransi di tengah masyarakat multikultural.

Keempat, dokumen program dan *statement-statement* terkait dengan program kampung moderasi beragama memang banyak mengandung nilai-nilai toleransi, sehingga wacana yang dominan di konstruksikan adalah wacana toleransi. Sederhananya, wacana dalam program kampung moderasi beragama diproduksi melalui peraturan tertulis dan *statement-statement* yang memang mengarah kepada nilai-nilai toleransi. Oleh karena itu, dalam level analisis produksi teks, dokumen program dan *statement-statement* Kakanwil Kemenag Bangka Tengah menjadi dasar dari diproduksi sebuah wacana toleransi dalam program kampung moderasi beragama, khususnya di Kabupaten Bangka Tengah. Dikonstruksikannya wacana tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan sosial. Mengulik kembali pendekatan pluralisme antagonis dan pluralisme agonistik (yang sudah peneliti sampaikan di latar belakang), program kampung moderasi beragama memang menjadikan kedua pendekatan tersebut sebagai dasar untuk meningkatkan toleransi. Hal ini karena ditengah masyarakat yang dikatakan plural, program-program tersebut sangat diperlukan agar dapat menanamkan sikap menghargai dan menerima pelbagai perbedaan di masyarakat. Perbedaan-perbedaan itu juga merupakan realitas dari masyarakat plural yang tidak bisa dihindarkan. Maka dari itu, sikap menghormati satu sama lain menjadi penting

dalam masyarakat demokratis.

Kelima, program kampung moderasi beragama di Bangka Tengah kerap kali menggunakan aktivitas bersama untuk mengkonstruksi wacana toleransi. Sehingga bahasa-bahasa yang digunakan juga sangat diperhatikan agar masyarakat dapat memahaminya dengan mudah. Tidak hanya itu, untuk menarik perhatian masyarakat secara luas, Kemenag Bangka Tengah juga menggunakan media sosial seperti Instagram, YouTube, dan tik tok dalam mengkonstruksikan wacana toleransi. Di sini, bahasa yang digunakan juga tergolong kepada bahasa yang ringan, persuasif, dan informatif seperti konten yang berbentuk video singkat yang didalamnya terkandung pesan toleransi. Dengan demikian, produksi wacana toleransi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pesan toleransi, namun juga berupaya untuk membentuk pemahaman baru di kalangan masyarakat.

Interpretasi Masyarakat terhadap Wacana Toleransi dalam Program Kampung Moderasi Beragama di Bangka Tengah

Penerimaan atau respons masyarakat terhadap wacana toleransi dalam program kampung moderasi beragama ini bisa beragam. Masyarakat yang cenderung lebih terbuka terhadap ideologi negara kemungkinan bisa menerima program ini, namun di sisi lain, kelompok yang mempunyai pandangan agama yang lebih konservatif kemungkinan akan merasa bahwasannya moderasi beragama adalah ancaman terhadap keyakinan mereka. Oleh karena itu, analisis dalam konteks ini akan menyoroiti bagaimana produksi wacana toleransi beragama berpengaruh terhadap masyarakat Bangka Tengah.

Isu-isu intoleransi di Bangka Tengah menjadikan program kampung moderasi beragama sebagai suatu hal yang *urgent* untuk direalisasikan, terlebih lagi ditengah penganut agama yang dikatakan konservatif. Wacana toleransi yang dikonstruksikan oleh Surat Keputusan dan ungkapan Kepala Kemenag Bangka Tengah, Bapak H.M Karyawan, S.Ag (tercantum pada level analisis teks) itu nyatanya telah memberikan pemahaman terkait dengan toleransi. Untuk melihat serta meninjau hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara bersama informan yang dianggap telah memenuhi kriteria untuk menjawab rumusan masalah paa level ini. Berikut informan dalam penelitian ini, yakni Bapak Mustaryadi selaku Kasubag sekaligus sekretaris FKUB Bangka Tengah, Bapak Ngiat Hiung selaku Kepala Desa Trubus, Ibu Yohana selaku PSM Desa Trubus, serta Bapak Theo Filus Dwi Setiano selaku tokoh agama di Desa Trubus. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada 13 dan 16 Januari 2025, menyatakan bahwa:

“program ini memang sangat penting bagi masyarakat yang mempunyai keberagaman dalam beragama agar nantinya masyarakat kita juga akan lebih toleran

dan moderat dari hadirnya program ini” (Wawancara Mustaryadi, 13 Januari 2025).

Kepala Desa Trubus juga turut memberikan pendapat terkait dengan program kampung moderasi beragama dan bagaimana program tersebut mengkonstruksikan wacana toleransi yang dianggap penting bagi masyarakat yang multikultural.

“Program kampung moderasi beragama merupakan suatu hal yang mutlak dan harus ada di desa-desa yang multikultural agar tatanan kehidupan masyarakatnya damai, maka dari itu kami sangat mendukung program tersebut” (Wawancara Ngiat Hiung, 16 Januari 2025).

Selain daripada Kepala Desa Trubus, PSM Desa Trubus dan Tokoh agama yang ada di Desa Trubus Juga ikut memberikan penafsiran terkait dengan program kampung moderasi beragama dan bagaimana program ini sangat dibutuhkan masyarakat multikultural agar mereka bisa hidup damai dan harmonis. Sehingga mereka juga sangat menerima dan bahkan mendukung program tersebut untuk kemudian terus dikampanyekan agar nilai-nilai toleransi semakin melekat dalam diri masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bersama Ibu yohana (PSM desa Trubus) serta Bapak Theo Filus Dwi Setiano dan Bapak Hendrikus (tokoh agama Desa Trubus).

“program ini memang baik untuk meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama apalagi Desa Trubus ini kan sangat multikultural dalam hal beragama” (Wawancara Yohana, 13 Januari 2025).

“tujuan dari program kampung moderasi beragama ini memang bagus apalagi bagi masyarakat trubus yang mempunyai keberagaman dalam beragama” (Wawancara Theo Filus Dwi Setiono, 16 Januari 2025).

Artinya, program kampung moderasi beragama ini *pure* dianggap untuk meningkatkan toleransi serta menjadikan masyarakat lebih moderat dalam beragama di Kabupaten Bangka Tengah. Mereka juga sepakat jika seluruh elemen masyarakat ikut terlibat dalam perayaan hari-hari besar keagamaan. Atas dasar untuk meningkatkan toleransi serta menjadikan masyarakat lebih moderat dalam hal beragama menjadi alasan mereka untuk sepakat dengan wacana-wacana yang telah dikonstruksikan. Tidak hanya itu, berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Mustofa Tohari, S.pd., M.Pd selaku akademisi, juga beranggapan bahwa;

“Toleransi itu bukan berarti mencampur adukkan ritual ibadah makanya kita harus cerdas dalam beragama. kita harus bisa membedakan mana itu ranah agama dan mana itu ranah sosial. Kalau ranah agama atau keyakinan itu kita tidak boleh

mencampur adukkan, contohnya jika saya beragama Islam dan saya merasa saya sangat toleran tapi bukan berarti saya ikut ke gereja untuk merayakan natal. Tetapi seandainya saya diundang ke acara natal misalnya sekedar silaturahmi ke rumahnya, saya datang kerumahnya bukan untuk merayakan natalnya tetapi hanya untuk silaturahmi (Wawancara Mustofa Tohari, 13 Januari 2023).

Jadi memang perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan dalam merayakan hari besar keagamaan itu harus dipisahkan mana yang bersifat keyakinan atau ritual ibadah dengan mana yang ranah sosial. Apa yang telah ditampilkan serta dikonstruksikan dalam program kampung moderasi beragama ini juga tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang berada pada instansi pemerintahan. Adalah Rama Setya Nizar selaku ketua karang taruna Bangka Tengah, berdasarkan hasil wawancara pada 13 Januari 2025 mengungkapkan bahwa: *“moderasi beragama itu esensial karena bersifat moderat, bersifat tengah-tengah, sehingga dalam beragama itu tidak ekstrem, tidak fanatic, tetapi juga tidak liberal”* (Wawancara Rama Setya Nizar, 13 Januari 2025).

Selain itu, ungkapan yang kurang lebih serupa, namun disampaikan dengan lebih keras datang dari Ferian selaku wakil ketua karang taruna Bangka Tengah:

“program ini sangat bagus bagi kehidupan bermasyarakat dan apabila ada orang-orang yang tidak setuju dengan moderasi beragama mungkin perlu mengkaji lebih dalam lagi apa yang dimaksud dengan moderasi beragama” (Wawancara Ferian, 13 Januari 2025).

Dari interpretasi masyarakat terhadap kampung moderasi beragama sebagaimana yang sudah dijabarkan, program kampung moderasi beragama telah membentuk cara pandang masyarakat terhadap praktik beragama yang moderat. Hal inilah yang menunjukkan penggambaran menurut Norman Fairclough terkait dengan bahasa (teks) yang berdialektika dengan ideologi. Bahwa program kampung moderasi beragama itu di satu sisi bahasanya dibentuk oleh ideologi, dan di sisi lain bahasa itu juga akan membentuk ideologi. Sama halnya dengan apa yang telah peneliti singgung sebelumnya, dalam hal ini ideologi diartikan sebagai “pandangan tentang dunia (*worldview*)”. Lebih jauh, peneliti mencermati bahwa, isu-isu intoleransi yang ada di Bangka Tengah (terkait dengan masyarakat yang dapat dikatakan konservatif dalam praktik beragama) sebelum akhirnya program kampung moderasi beragama telah “berhasil” merubah pandangan itu, namun daripada itu, telah terjadinya proses pertarungan ideologis (terkait dengan ideologi yang dimiliki masyarakat sebelumnya dan ideologi dibalik wacana yang dikonstruksikan dalam program kampung moderasi beragama). Menurut Fairclough, pertarungan ideologis itu merupakan salah satu

dimensi dalam praktik diskursif untuk membentuk kembali ideologi-ideologi yang mendasari individu atau sekelompok orang dalam konteks restrukturisasi dan transformasi relasi dominasi.

Analisis Dimensi Sociocultural Practice

Pertama, Dalam konteks Kabupaten Bangka Tengah, semenjak tahun 2023 isu-isu terkait dengan intoleransi mulai mencuat akibat dari adanya dinamika penolakan dari pelbagai pihak terkait dengan PTN Konghucu di Bangka Tengah. Penolakan ini tentu saja berpotensi terjadinya konflik berbasis agama. Hal ini karena, aktor-aktor yang menolak pembangunan tersebut mengatasnamakan aliansi umat Islam. Artinya, terdapat semacam perlakuan yang diskriminatif terhadap umat yang dapat dikatakan sebagai minoritas. Padahal secara legalitas hukum, masyarakat mempunyai kebebasan dalam beragama. Selaras dengan UUD Negara Republik Indonesia rumusan pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Sikap mayoritas-minoritas ini tentu saja membuat adanya salah satu pihak yang dirugikan. Seperti hal nya pembangunan PTN tersebut yang sebenarnya bertujuan untuk mencetak guru agama yang berkompeten. Oleh karena itu, situasi sosial politis ini mempengaruhi kenapa program kampung moderasi beragama itu dibangun atau dibentuk lebih cepat di Bangka Tengah.

Selain daripada itu, Bapak Mustaryadi, S.Pd., M.Pdi (Kasubag TU sekaligus sekretaris FKUB) dan Bapak Hendri Noviarto, S.Ip., M.Ap (Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM daerah Bangka Tengah) juga turut memberikan pendapat terkait dengan situasi sosial politis di Kabupaten Bangka Tengah. Pendapat yang disampaikan sebagai berikut:

“sosial politis jika dikaitkan dengan moderasi beragama dan toleransi di Bangka Tengah, memang masih ada segelintir masyarakat yang mungkin berpaham lama sehingga kadang kala perubahan-perubahan yang ada pada kondisi saat ini dimaknai lain, oleh karena itu masih ada masyarakat yang kurang mendukung untuk kegiatan tersebut, terutama tentang pendirian rumah ibadah dan kegiatan-kegiatan lainnya” (Wawancara Mustaryadi, 16 Januari 2025).

Selanjutnya, Kepala badan kepegawaian dan pengembangan SDM daerah Bangka Tengah berpendapat bahwa:

“Secara umum di Bangka Tengah itu hampir tidak ada hanya saja jangan dipancing, hal ini karena pada umumnya masyarakat itu lebih mudah terpancing atau terprovokasi. Tapi untungnya tipikal masyarakat Bangka Tengah itu sekalipun mereka

mudah terprovokasi, mereka juga mudah untuk di mediasi. makanya isu-isu intoleransi yang ada, khususnya di Bangka Tengah sebenarnya tidak terlalu mencuat” (Wawancara Hendri Novianto, 16 Januari 2025).

Maka dari itu, terbentuknya wacana toleransi juga tidak terlepas dari pengaruh konteks sosial politis yang ada di Bangka Tengah. Dalam artian, kuatnya program ini digaungkan di Bangka Tengah berkenaan dengan adanya isu-isu atau bahkan tindakan intoleransi di Bangka Tengah.

Kedua, fenomena penganut agama yang konservatif, fenomena ini merujuk kepada individu atau kelompok yang memeluk dan mengamalkan suatu ajaran agama dengan cara yang tradisional dan ketat sehingga acapkali menekankan pada pemeliharaan praktik dan nilai-nilai yang dianggap otoritatif (sesuai dengan teks-teks agama). Sama seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Mustaryadi, S.Pd., M.Pdi selaku Kasubag TU sekaligus sekretaris FKUB Bangka Tengah, beliau mengungkapkan bahwa *“memang masih ada segelintir masyarakat yang mungkin berpaham lama sehingga kadang kala perubahan-perubahan yang ada pada kondisi saat ini dimaknai lain”* (wawancara Mustaryadi, 16 Januari 2025).

Penganut agama yang konservatif cenderung menolak setiap perubahan dalam ajaran dan praktik agama yang *bermetamorfosis* di luar nilai-nilai tradisional (mempertahankan kemurnian agama dan dianggap sudah mapan dan sah sehingga tidak boleh dimodifikasi). Modernisasi dianggap akan mengubah esensi dari ajaran agama. Fenomena ini tentu saja mempunyai dampak yang signifikan bagi pelbagai aspek kehidupan. Dalam banyak kasus terkait dengan penganut agama yang konservatif, mereka memandang dunia modern itu akan akan mengancam nilai-nilai agama yang dianggap sudah mapan dan sah. Penganut agama konservatif memang cenderung menekankan pada tradisi agama. Mereka menganggap tradisi itu bukan hanya terkait dengan kebiasaan sosial, akan tetapi lebih kepada cara yang mereka anggap benar dalam beragama yang sudah diteruskan oleh para leluhurnya. Sehingga, ketika penganut agama yang konservatif merasa keyakinan mereka terancam, maka bisa jadi mereka beralih kepada sikap ekstremisme. Dalam beberapa kasus, hal ini bisa berakibat pada radikalisasi dan kekerasan. Mulai dari bentuk serangan terhadap kelompok agama sampai kepada memaksakan keyakinan mereka dengan cara-cara yang agresif. jika dikaitkan dengan konteks Bangka Tengah, aktor-aktor yang menolak pembangunan PTN tersebut (aliansi umat Islam dan aliansi umat Islam Bangka Tengah) tergolong penganut agama yang konservatif. Dikatakan demikian karena, alasan mereka yang menolak disebabkan mayoritas masyarakat Bangka Tengah beragama Islam dan terdapat semacam kekhawatiran akan

tercampur aduknya nilai-nilai keagamaan Islam dalam masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Adapun hasil temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa, program kampung moderasi beragama menjadi medium bagi Kementerian Agama untuk menyampaikan wacana toleransi di tengah masyarakat yang multikultural. Mulai dari- *pertama*, program ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi atas isu-isu intoleransi atau konflik berbasis agam, akan tetapi juga sebagai instrument hegemonic yang mengarahkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai toleransi dan moderasi. *Kedua*, dokumen kebijakan seperti Keputusan Kemenag Bangka Tengah No 158 Tahun 2023 dan wawancara Kakanwil Kemenag Bangka Tengah menunjukkan narasi yang menekankan pentingnya toleransi untuk menjaga stabilitas sosial. *Ketiga*, produksi wacana toleransi melibatkan berbagai aktor institusional seperti Kemenag, FKUB, dan Pemerintah Desa, yang memperlihatkan relasi kuasa sebagai penentu legitimasi makna toleransi. Masyarakat kemudian mengadopsi nilai-nilai toleransi sebagai pedoman hidup. *Keempat*, pada dimensi *sociocultural*, semakin menguatkan temuan dalam penelitian ini. Realitas sosial yang ada di Bangka Tengah, menunjukkan bahwa keberhasilan dari program ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, sejarah panjang masyarakat, solidaritas antarumat beragama, serta keberadaan Pemerintah Daerah dan tokoh agama yang menjadi mediator dalam mengelola keberagaman. Program ini telah berhasil menjadi katalisator (mampu menjadi pendorong masyarakat untuk bergerak maju) penguatan kohesi sosial (mempertahankan kesatuan dan kebersamaan) serta mengungkap sisi-sisi paradoks seperti, program kampung moderasi beragama dipromosikan sebagai upaya atas isu-isu atau bahkan konflik terkait dengan intoleransi.

Saran

Pertama, bagi masyarakat tentu saja diharapkan agar dapat memahami konsep dari moderasi beragama. Dalam hal ini, masyarakat juga diharapkan untuk dapat hidup berdampingan di tengah pelbagai perbedaan serta menjalankan kehidupan keagamaan secara moderat. *Kedua*, bagi Kementerian Agama Kabupaten Bangka Tengah, sebagai instansi yang menaungi program kampung moderasi beragama di Bangka Tengah, diharapkan pemerintah (Kemenag Bangka Tengah) juga turut memikirkan cara agar program kampung moderasi beragama ini dapat berkembang tidak hanya di Desa Trubus. *Ketiga*, Bagi akademisi, dapat menjadi penguatan kajian akademis sebagai basis perumusan kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa wacana toleransi ini bersifat dinamis serta dipengaruhi oleh struktur sosial politik yang kompleks. Maka dari itu, akademisi dapat terus mengkaji aspek-aspek

baru dalam moderasi beragama, termasuk mengkritisi potensi dari bias ideologis dalam sebuah kebijakan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: Lkis.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London and New York: Longman.
- Fairclough, N. (2010). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson.
- Fathurahman, O. (2020). Kenapa Harus Moderasi Beragama. Retrieved from Kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/opini/kenapa-harus-moderasi-beragama-an4gk2>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Herza. (2019). *Kritik terhadap Praktik Beragama dalam Film PK (Sebuah Studi Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough)*. Universitas Gadjah Mada.
- Kementerian Agama RI. (2023). Kemenag Luncurkan Program 1.000 Kampung Moderasi Beragama. Retrieved from Kemenag.go.id website: <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-luncurkan-program-1-000-kampung-moderasi-beragama-uE6vi>
- Khoiri, A. (2019). Moderasi Islam dan Akulturasi Budaya: Revitalisasi Kemajuan Peradaban Islam Nusantara. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 1–17. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v0i0.4372>
- Kridalaksana, H. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahendra, A. B. (2022). Aliansi Umat Islam Bangka Tengah Tolak Rencana Pengembangan PTN Konghucu di Desa Batubelubang. Retrieved from Bangkapos.com website: <https://bangka.tribunnews.com/2022/05/31/aliansi-umat-islam-bangka-tengah-tolak-rencana-pembangunan-ptn-konghucu-di-desa-batubelubang>
- Nurhaliza, S. (2024). Meminimalisir Konflik Ekstremisme Perilaku Umat Beragama Melalui Moderasi Beragama. *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society*, 3(1), 333–340.
- Pricispa, I., Azzahra, Y., Putri, N., & Herza, H. (2023). The Discourse Battle on the Establishment of Confucian State University in The Bangka Belitung Islands Province. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 8(2), 116–129. <https://doi.org/10.17977/um021v8i2p116-129>
- Shoemaker, P. J. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influence on Media Content*. New York: Longman.
- Solihin, M. (2023). BNPT Ungkap 148 Teroris ditangkap sepanjang 2023, didominasi Jarinan II-JAD. Retrieved from news.detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-7115566/bnpt-ungkap-148-teroris-ditangkap->

sepanjang-2023-didominasi-jaringan-ji-jad

- Subagyo, P. A. (2018). *Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough Dalam Hamparan Wacana (Dari Praktik Ideologi, Media, Hingga Kritik Poskolonial)*. Yogyakarta: Ombak.
- Truna, D. S., Syukur, A., Qodim, H., & Mukarom, A. S. (2020). Pendidikan Multikultural sebagai Upaya Pencegahan Radikalisme di Indonesia. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–14.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of Critical Discourse Analysis* (2nd ed.). Los Angeles: Sage Publications.